

REFORMASI BIROKRASI DENGAN DIGITALISASI PAJAK DALAM UPAYA Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI

Septiawan Puji Trianto¹, Muhammad Syaiful Fadhli², Muhammad Arif Triyoga³, Sara Yogi Istiqomah⁴, Muhammad Rizky Irawan⁵

iyangame494@gmail.com¹, sf37505@gmail.com², arif3yoga@gmail.com³, sarayogi3731@gmail.com⁴, qwanirawan@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak: Digitalisasi perpajakan telah menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan perpajakan. Digitalisasi perpajakan merupakan suatu inovasi perpajakan yang memberikan fungsionalitas yang mudah digunakan kepada wajib pajak melalui pemerintah dalam bentuk aplikasi layanan perpajakan berbasis online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Digitalisasi pajak memberikan manfaat yang konkret baik bagi masyarakat sebagai wajib pajak ataupun bagi pemerintahan. Namun, digitalisasi juga memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perpajakan di Indonesia setelah mengalami digitalisasi, mulai dari pengumpulan informasi, proses perpajakan, dan pelaporan pajak menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat. Selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, digitalisasi juga membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi potensi kebocoran dan penyalahgunaan.

Kata Kunci: Digitalisasi perpajakan, wajib pajak, pertumbuhan ekonomi.

Abstract: Tax digitalization has become the government's main focus to increase efficiency, transparency and tax compliance. Tax digitalization is a tax innovation that provides easy-to-use functionality to taxpayers through the government in the form of an online-based tax service application. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Tax digitalization provides concrete benefits both for society as taxpayers and for the government. However, digitalization also has a negative impact on economic growth. Taxation in Indonesia after experiencing digitalization, starting from information collection, taxation processes and tax reporting has become faster, easier and more accurate. Apart from providing convenience for taxpayers, digitalization also helps the government increase tax revenues and reduce the potential for leakage and misuse.

Keyword: Digitalization of taxation, taxpayers, economic growth.

PENDAHULUAN

Teknologi berkembang pesat dan memberikan dampak positif dalam mendorong pembangunan nasional secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan dalam berbagai fasilitas yang tersedia bagi warganya. Pembangunan nasional merupakan salah satu kriteria kemajuan suatu negara. Perkembangan suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh sumbangan dan pendanaan dari masyarakat yang disebut juga pajak.

Di Indonesia, upaya digitalisasi perpajakan telah menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan perpajakan. Sejalan dengan gerakan global untuk menerapkan teknologi di berbagai bidang kehidupan, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk mendorong penggunaan teknologi digital dalam administrasi perpajakan.

Digitalisasi perpajakan merupakan suatu inovasi perpajakan yang memberikan fungsionalitas yang mudah digunakan kepada wajib pajak melalui pemerintah dalam bentuk aplikasi layanan perpajakan berbasis online dan jaringan internet, seperti pelaporan dan pembayaran pajak misalnya. Tujuan digitalisasi pajak adalah untuk memberikan layanan pengarsipan yang lebih baik kepada wajib pajak pada saat pajak.

Era digitalisasi juga membawa tantangan dan peluang bagi otoritas untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Melihat tantangan perkembangan teknologi informasi tersebut, timbul beberapa permasalahan dari sisi perpajakan, yaitu rumitnya administrasi perpajakan dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Perkembangan teknologi juga memberikan peluang bagi fiskus. Sekiranya peluang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Pengertian pajak sudah diketahui semua orang, dan kata pajak sudah sangat dikenal dan sering didengar dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk disadari bahwa departemen perpajakan merupakan salah satu penopang utama perekonomian suatu negara. Penerimaan pajak yang optimal menjadi kunci dalam mendukung pembangunan infrastruktur, program kesejahteraan, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan pengelolaan perpajakan manual seringkali berdampak pada efisiensi dan efektivitas pengumpulan dan pengelolaan data perpajakan.

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan salah satu agenda penting Direktorat Jenderal Pajak dalam reformasi perpajakan. Perencanaan pelaksanaan dengan menggunakan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau disingkat PSIAP dengan menggunakan sistem informasi yang mengusung teknologi commercial off-the-self (COTS), yang akan mempermudah para wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban dalam proses perpajakannya.

Dengan digitalisasi perpajakan, pemerintah berupaya mengatasi berbagai kendala terkait proses manual yang rumit dan rawan kesalahan manusia. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data, sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memperluas basis pajak.

Berbagai manfaat digitalisasi perpajakan yang dirasakan masyarakat saat ini hanya terbatas pada bidang praktis, seperti peningkatan kualitas layanan dan kemudahan penggunaan, produktivitas, dan akuntabilitas. Sejauh ini, dampak digitalisasi terhadap stabilitas perekonomian Indonesia masih sedikit mendapat perhatian. Memahami hubungan antara pajak dan perekonomian sangatlah penting. Selain itu, dunia saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, termasuk pandemi, politik, energi, dan keamanan. Oleh karena itu, banyak negara telah melakukan penelitian untuk mengkaji hubungan antara digitalisasi sistem perpajakan dan stabilitas perekonomian.

Namun, meskipun upaya untuk digitalisasi perpajakan telah dilakukan, tantangan dalam penerapannya masih ada. Salah satu tantangan terbesarnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan wajib pajak, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Selain itu, keamanan data juga

menjadi perhatian utama dalam penerapan sistem digitalisasi perpajakan, mengingat potensi risiko penyebaran atau penyalahgunaan informasi sensitif. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji secara menyeluruh dampak dan manfaat digitalisasi perpajakan di Indonesia. Jika pemerintah memahami dampak positif digitalisasi pajak, mereka dapat terus mengembangkan kebijakan untuk mendukung implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam memenuhi penelitian ini, menerapkan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan output data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk melengkapi penulisan penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif dengan mendeskripsikan fenomena yang diteliti berdasarkan sumber dari berita dan jurnal yang relevan dengan topik pembahasan.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh digitalisasi pajak terhadap efisiensi administrasi dan pengumpulan pajak di Indonesia, serta bagaimana hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara.

Pembahasan dalam penelitian ini didukung juga oleh (Wulandari, 2023:3) dan (Cahyono, 2020:32) yang mana gigi telah selesai pajak tersebut memiliki implikasi pada nilai kepatuhan wajib pajak. Kesadaran tersebut disertai dengan dukungan aplikasi perpajakan yang bisa diakses secara online atau digital juga bisa dikatakan sebagai faktor pendorong lain atau pendorong lanjutan terhadap kepatuhan pelapor wajib pajak. Digitalisasi sistem perpajakan Indonesia saat ini juga dinilai sebagai momentum yang tepat mengingat Indonesia dan 138 negara lainnya akan memasuki era pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau automatic exchange of financial information (AEoI) terkait perpajakan yang ditandai dengan ditandatanganinya Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA). Indonesia juga telah merespon hal tersebut melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan. Selain itu, berakhirnya masa amnesti pajak dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki basis data perpajakan guna membangun sistem informasi perpajakan yang terintegrasi.

Dengan hal tersebut maka digitalisasi sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Di beberapa sektor dapat memberikan gambaran dampak positif yang menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital menjadi salah satu aspek pendorong dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu contoh yang dapat diambil dapat dilihat dari nilai transaksi ekonomi digital yang secara signifikan mengalami penambahan jumlah serta sistem ekonomi digital yang sudah mulai berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia.

Hasil bahasan dari kami juga dapat menarik garis lurus bahwa digitalisasi pajak mewujudkan para wajib pajak dalam langsung kegiatan pelaporan dalam pajak terlebih dengan adanya dukungan atau hadirnya aplikasi pajak seperti e-SPT. Dengan demikian kami bisa mengungkapkan bahwa keberadaan sistem elektronik memiliki dampak positif terhadap kepatuhan terhadap wajib pajak terhadap tanggungan atau kewajiban yang ia miliki. Karena dengan adanya sistem elektronik akhirnya tercipta sebuah terobosan atau inovasi berupa alat digital atau layanan digital untuk mempermudah dan memangkas birokrasi dalam pelaporan pajak yang hal ini bisa dikatakan juga sebagai upaya dalam reformasi birokrasi.

Penggunaan teknologi digital meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek, salah satu contohnya dalam penggunaan modal dan tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja yang sudah mengusung teknologi digital akan meminimalisir pengeluaran biaya tetapi meningkatkan output yang dihasilkan, sehingga teknologi digital jelas memberikan kontribusinya terhadap sektor-sektor

ekonomi. Dalam perkembangan teknologi digital juga terdapat kemajuan teknologi informasi. Adanya perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan serta efisiensi sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, salah satu contoh pengaruh teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dalam aspek modal dan tenaga kerja yaitu dengan berjualan melalui livestreaming di tiktok, dengan menggunakan livestreaming di tiktok, penjual tidak harus menyewa toko untuk berjualan dan juga tidak perlu banyak orang untuk berjualan.

Peluang generasi muda sangat besar dalam penguasaan perkembangan teknologi. Karena digitalisasi juga meningkatkan akses pasar, sehingga generasi muda bisa mengembangkan pengendalian untuk meningkatkan kualitas infrastruktur digital dan sistem. Penguasaan oleh generasi muda tersebut akan membuat teknologi digitalisasi lebih memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi.

Namun, digitalisasi juga memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak negatif digitalisasi yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya adalah teknologi yang dapat menyebabkan penipuan online, pencurian data pribadi, dan kejahatan cyber lainnya. Kondisi ini dapat mengganggu keamanan dan kestabilan sistem ekonomi, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Selain itu, digitalisasi juga dapat mempengaruhi lapangan kerja, dengan beberapa pekerjaan tradisional menjadi tidak relevan atau digantikan oleh teknologi. Hal ini dapat meningkatkan ketidakseimbangan sosial dan mengganggu stabilitas ekonomi.

Dewasa ini perkembangan ekonomi digital di Indonesia memberikan peranan terbesar yang mengatur jalur pertumbuhan ekonomi. Hal itu membuat pemerintah berupaya untuk membangkitkan perekonomian dengan perantara perkembangan ekonomi digital. Salah satu hal yang dilakukan yaitu melakukan bisnis yang berbasis e-commerce. Ekonomi digital yang terus dikembangkan oleh pemerintah di Indonesia sedikit banyak akan memberikan dampak baik positif ataupun negatif bagi masyarakat ataupun pemerintah. Dampak yang dirasakan akan berpengaruh terhadap perekonomian, dan secara tidak langsung pengaruh tersebut akan memunculkan manfaat dari diadakannya digitalisasi pajak, karena dengan segala kemudahannya masyarakat meningkatkan perekonomian maka dipermudah juga kewajiban mereka sebagai wajib pajak dalam memenuhinya.

2. Manfaat konkret yang diperoleh dari implementasi digitalisasi pajak.

1) Manfaat membayar pajak yang diterima oleh masyarakat :

a. Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Dengan pembayaran pajak, maka pembangunan jalan, jembatan, sekolah, tol dan fasilitas lainnya akan semakin mudah dengan alokasi dana penerimaan pajak dan masyarakat sendirilah yang akan menikmati fasilitas tersebut.

b. Pelengkapan Fasilitas Pendidikan

Uang yang terkumpul dari pembayaran pajak juga digunakan pemerintah untuk melengkapi sarana dan fasilitas pendidikan agar calon penerus bangsa bisa dengan nyaman mencari ilmu dan bisa bersaing dengan negara luar. Contoh program pemerintah dalam hal pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kelengkapan sarana belajar seperti meja dan kursi sekolah adalah beberapa manfaat membayar pajak dari sektor pendidikan.

c. Tersedianya Transportasi Umum yang Nyaman

Pemerintah menyediakan sarana transportasi umum yang baik, nyaman, dan terjangkau di berbagai daerah untuk masyarakat sebagai upaya dalam mengatasi kemacetan dan masalah umum lainnya.

d. Fasilitas Kesehatan

Sebagian dari hasil penerimaan pajak dialirkan untuk sektor kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas rumah sakit serta pembiayaan JKN/ KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

e. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Dana penerimaan pajak digunakan untuk pengadaan senjata atau kendaraan tempur dan memodernisasi seluruh aspek keamanan darat, air, dan udara.

2) Manfaat membayar pajak bagi pelaku bisnis :

a. Keuntungan Pengusaha Dalam Negeri Akan Berlipat Ganda

Barang-barang impor yang dikenakan pajak tinggi oleh pemerintah bertujuan agar produksi dalam negeri mampu bersaing di pasaran. Para pengusaha dapat memajukan usahanya dan bersaing dengan barang impor.

b. Mendapatkan Pinjaman Lebih Mudah

Membayar pajak memudahkan pelaku bisnis untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Dengan kartu NPWP khusus bisnis, bank akan menganggap anda adalah pelaku bisnis yang profesional.

c. Menunjukkan Kesehatan Keuangan Perusahaan

Direktorat Jenderal Pajak akan mengenakan denda bagi setiap pengusaha yang terlambat membayar pajak. Sehingga perusahaan yang taat membayar pajak akan dicatat sebagai perusahaan yang sehat dalam keuangan.

d. Bisnis menjadi lebih profesional

Membayar pajak bisnis akan membuat bisnis terlihat lebih profesional di hadapan distributor dan konsumen. Karena dalam surat kerjasama kontrak yang dilakukan oleh perusahaan di bidang manufaktur memiliki syarat terpenting yaitu adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

KESIMPULAN

Mengikuti perkembangan digitalisasi di lingkup perpajakan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem perpajakan. Perpajakan di Indonesia setelah mengalami digitalisasi, mulai dari pengumpulan informasi, proses perpajakan, dan pelaporan pajak menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat. Selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, digitalisasi juga membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi potensi kebocoran dan penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mayasari, R., & Narsa, I. M. (2020). Kajian kritis terhadap strategi reformasi perpajakan dalam menyambut era digital. *e-Jurnal Akuntansi (EJA)*, 30(2), 414-427.
- Bachtiar, P. P., Diningrat, R. A., Kusuma, A. Z. D., Izzati, R. A., & Diandra, A. (2020). *Ekonomi digital untuk siapa. Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia*. Jakarta: The SMERU Institute.
- Manik, N., & Sukadana, W. (2020). Memahami Ekonomi Digital Di Indonesia: Studi Kasus Marketplace. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(2).
- Firmansyah, R., Hasanah, N., & Sumiati, A. (2021). Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Pemilihan Platform Digital Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(3), 517-536.
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi digitalisasi administrasi perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37- 54.
- Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(01), 85-107.
- Abdillah, K. (2023). Pengaruh Digitalisasi dan Variabel-Variabel Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Asia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 17-27.
- Widayati, T., GS, A. D., Nugroho, N., Rahayu, S., Boari, Y., Syamil, A., ... & Suryahani, I. (2023). *PEREKONOMIAN INDONESIA: Perkembangan & Transformasi Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mubin, A. A. P., Dahlia, D., & Selong, A. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pelayanan, Insentif dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Bapenda Kota Makassar. *YUME: Journal of*

Management, 7(1), 616-632.

Sinuhai, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 6974-6990.

Rusdiyanto, R., & Pramitasari, D. A. *Buku Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*.